

TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP BUKU "TEORI POLITIK ISLAM"

Muhammad Teguh Yuliansyah¹, Mangihut Siregar²

^{1,2}Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Jalan Dukuh Kupang XXV, No 54, Surabaya
Email: mangihut@uwks.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini mengulas buku karya Dr. Dhiauddin Rais yang berjudul "Teori Politik Islam" yang diterbitkan oleh Gema Insani Press. Buku ini membahas tentang bagaimana hubungan antara teori politik dengan ajaran Islam dimana kini sebagian umat Islam modern lebih memilih berpendapat untuk melakukan pemisahan antara mana politik dan mana agama. Lebih lanjut Dr. Dhiauddin Rais juga memberikan ulasan dan mengkaitkan praktik politik di masa sebelum adanya sekulerisme dengan teori politik yang dikemukakan oleh para ahli ilmu politik. Dr. Dhiauddin Rais juga memberikan penjelasan yang jelas dan ilustrasi yang relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana teori – teori tersebut bisa dipraktikkan dalam konteks politik Indonesia dan global. Beliau juga menekankan teori politik Islam ini tidak perlu ditabrakkan dengan ideologi yang kita pahami, dimana bangsa Indonesia sudah memiliki sebuah dasar negara yaitu sebuah falsafah dari founding father yang berupa lima sila dalam Pancasila. Dalam melakukan kajiannya Dr Dhiauddin Rais melakukan pendekatan dengan Pustaka, karena beliau merasa dengan mengaitkan praktik teori politik di masa lampau dan pendapat para ahli politik akan ditemukan benang merah dimana bahwa Islam sebenarnya bukan seperti klaim para pembaharu yang merasa bahwa Islam adalah sekadar keyakinan atau hubungan rohani antara seorang individu dengan Tuhannya sehingga tidak memiliki hubungan sama sekali dengan urusan-urusan yang dianggap sebagai materi di kehidupan dunia ini. Buku ini memberikan suatu pandangan dimana teori politik Islam adalah suatu cabang dari teori politik yang bisa dipraktikkan di masa sekarang.

Kata Kunci : Islam; Teori Politik; Ideologi

ABSTRACT

This article reviews the book by Dr. Dhiauddin Rais entitled "Theory of Islamic Politics" published by Gema Insani Press. This book discusses the relationship between political theory and Islamic teachings where now some modern Muslims prefer to argue to separate politics and religion. Furthermore, Dr. Dhiauddin Rais also provides a review and links political practices in the era before secularism with political theories put forward by political scientists. Dr. Dhiauddin Rais also provides clear explanations and relevant illustrations to provide a deeper understanding of how these theories can be practiced in the context of Indonesian and global politics. He also emphasized that this Islamic political theory does not need to be clashed with the ideology that we understand, where the Indonesian nation already has a state foundation, namely a philosophy from the founding fathers in the form of five principles in Pancasila. In conducting his study, Dr. Dhiauddin Rais approached the Library, because he felt that by linking the practice of political theory in the past and the opinions of political experts, a common thread would be found where Islam is actually not like the claims of reformers who feel that Islam is merely a belief or spiritual relationship between an individual and his God so that it has no relationship at all with matters that are considered material in this worldly life. This book provides a view where Islamic political theory is a branch of political theory that can be practiced in the present.

Keywords: Islam; Political Theory; Ideology

PENDAHULUAN

Menurut Roger F. Soltau dalam introduction to politics ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga

yang akan melaksanakan tujuan tersebut, hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lain. Di dalam bukunya Roger F. Soltau menjelaskan bahwa ilmu politik merupakan sebuah studi sistematis tentang

kekuasaan, pemerintahan, dan perilaku politik. Ia menekankan pentingnya memahami struktur, proses, dan dinamika politik yang mempengaruhi masyarakat. Soltau juga menyoroti interaksi antara aktor politik, termasuk individu, kelompok, dan lembaga, serta bagaimana keputusan politik diambil dan dilaksanakan.

Dalam pandangannya, ilmu politik secara luas membahas aplikasi praktis dalam konteks kebijakan publik, hubungan internasional, dan isu-isu sosial. sehingga, ilmu politik menjadi alat untuk menganalisis dan memahami fenomena politik yang kompleks di dunia modern.

Membicarakan sebuah negara tentu kita harus mulai membahas mulai dari tonggak dasar suatu negara, yaitu kita harus membahas seberapa kuat masyarakat memiliki pemikiran politik yang kuat. Karena sebuah dasar negara maupun ideologi perlu dipahami sebagai sebuah cita – cita dan cara untuk mencapainya, tanpa sebuah pemikiran atau logika tentunya dasar tersebut hanya akan menjadi slogan kosong, dan hanya akan menjadi dogma yang diajarkan turun temurun tiap kata – katanya tanpa akan ada pemahaman dan pembahasan lebih lanjut tentang falsafah tersebut secara politik.

Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, hukum, dan kebijakan publik. Dalam praktiknya sebagai pendukung Teori politik, Islam diharapkan dapat menjadi panduan dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, serta mendorong masyarakat untuk hidup harmonis dalam keragaman. Konsep ini mencerminkan cita-cita dan nilai-nilai luhur yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia. Selaras dengan cita-cita Islam yang mendambakan suatu kondisi masyarakat yang aman dan sentosa, tanpa mengutamakan sebagian golongan ras maupun agama tertentu adalah konsep dari agama Islam sebagai Rahmatan lil alamin. Oleh karena itu sangat tidak relevan apabila suatu konsep keagamaan terutama yang Dr. Dhiauddin Rais bahas yaitu Islam tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan Pancasila. Pada beberapa momen Dr Dhiauddin mengangkat juga ketidaksetujuannya terhadap pemikiran orang - orang yang dianggap pembaharu bahwa seharusnya melakukan sekulerisme, beliau lebih lanjut menganggap bahwa sebenarnya menganggap agama sebagai landasan apapun untuk terutama umat muslim lakukan dalam hidup tidak akan

merusak hubungan antara politik dengan agama. Sebaliknya keduanya akan saling memperkuat karena sebenarnya keduanya memiliki mimpi yang sama yaitu masyarakat yang sempurna secara ideologis.

Sehubungan dengan pemahaman politik terdapat sebuah fenomena yang disadari oleh sebagian para ahli teori-teori politik secara umum, yaitu adanya kaitan antara munculnya pemikiran-pemikiran politik dengan praktek yang dilakukan di masa lampau (1). Kejadian di masa lampau tersebut dalam peradaban yang menggunakan landasan agama Islam dimana prakteknya sesuai madzhab pemikiran ahli politik tertentu maka hal tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya teori politik Islam mengalami perkembangan dari masa ke masa. Teori- teori ini terutama pada fase-fase pertumbuhan pertamanya menurut Dr. Dhiauddin Rais berkaitan amat erat dengan kejadian-kejadian sejarah Islam. Hingga menurut beliau hal itu harus dilihat seakan- akan keduanya adalah seperti dua sisi dari satu mata uang yaitu dua bagian yang berbeda akan tetapi saling melengkapi satu sama lain. Sifat hubungan di antara keduanya terus berevolusi. Terkadang pemikiran-pemikiran itu tampak menjadi penggerak terjadinya berbagai kejadian, dan seringkali kejadian-kejadian tersebut menjadi pendorong atau rahim yang melahirkan pendapat-pendapat itu. Kadang- kadang sebuah teori merupakan sebuah pandangan dari kejadian yang berlangsung pada masa lalu. Atau suatu kesimpulan yang dihasilkan melalui pemikiran atas suatu pendapat yang telah diakui pada masa sebelumnya. Bisa juga keduanya memiliki hubungan yang lain daripada dua contoh tersebut.

Dikarenakan adanya hubungan dua segi ini, segi teoretis dan realistik, maka jelaslah masing-masing dari kedua hal itu tidak dapat dipahami tanpa melihat segi yang satunya. Maka menurut Dr. Dhiauddin Rais metode yang tepat untuk mempelajari teori-teori ini adalah dengan mengkaji realitas yang terjadi di masa itu sambil disandingkan dengan pendapat beberapa ahli politik yang pendapatnya diakui hingga masa kini. Dalam buku ini dikaji oleh Dr. Dhiauddin Rais secara berurutan sesuai dengan fase-fase perkembangan historisnya yang sekaligus merupakan runtutan alami dan juga logisnya. Sehingga dapat dipahami hakikat hubungan yang mengkaitkan antara dua segi, dapat memperjelas

apa yang pendapat-pendapat tersebut lihat di masa tersebut dan impikan untuk masyarakat pada masa depan, dan dapat menunjukkan tempat tumbuh dan berbuahnya pemikiran tersebut sampai pada akhirnya mencapai kematangannya. Metode ini yang dipakai oleh dr. Dhiauddin Rais dalam penyusunan bukunya yaitu dengan mengkaji secara Pustaka bagaimana sebenarnya koneksi antara teori yang para ahli susun dengan kejadian politik yang terjadi.

METODE

Dr. Dhiauddin Rais menggunakan metode pustaka dengan melakukan perbandingan yang melibatkan beberapa kejadian di masa lampau. Kejadian tersebut dianalisis dengan menggunakan teori – teori yang dilahirkan oleh para ahli teori politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk membahas bagaimana Dr. Dhiauddin Rais melakukan penelitian atas Teori Politik Islam kita akan membaginya dalam beberapa bagian.

Era Kebinaan

Di bagian ini Dr. Dhiauddin Rais menggambarkan bahwa masa dimana pertama awal kemunculan ajaran Islam dalam sejarah Islam. Dimulai sejak Rasulullah Saw memulai berdakwah di umur 40 tahun mengajak manusia untuk menyembah Allah SWT hingga meninggalnya beliau. Era ini bisa kita sebut juga sebagai era "kenabian" atau "wahyu". Karena era itu terdapat suatu ciri tertentu yang membedakannya dari era-era yang lain. Pada waktu era ini berlangsung bisa dikatakan merupakan era yang ideal dimana semua nilai Islam terwujud dengan amat sempurna dengan adanya langsung nabi hidup dan melakukan kegiatan apapun termasuk dalam hal politik yang bisa dikatakan mendapatkan petunjuk langsung dari Allah SWT.

Era ini terbagi menjadi dua fase, yaitu masa Mekkah dan Madinah yang keduanya dipisahkan oleh hijrah. Kedua fase itu sebenarnya tidak memiliki perbedaan dari satu dengan yang lain, seperti yang diklaim oleh beberapa kelompok orientalis(2). Bahkan fase Mekkah bisa dikatakan sebuah fase yang menjadi pondasi dasar untuk

perkembangan fase kedua. Di fase pertama, masyarakat Islam baru terbentuk dengan ajaran yang perlahan – lahan mulai disampaikan oleh Nabi sendiri dan mulai ditetapkan kaidah- kaidah pokok Islam secara general. Kemudian pada fase kedua barulah masyarakat Islam itu sudah mulai berhasil terbentuk dan ajaran yang awalnya masih bersifat umum akhirnya dijabarkan secara mendetail. Syari'at Islam disempurnakan dengan mendeklarasikan prinsip-prinsip baru, dan dimulailah pengaplikasian dan pelaksanaan prinsip-prinsip itu seluruhnya. Sehingga tampillah Islam dalam bentuk sosialnya secara integral dan aktif, yang semuanya menuju kepada tujuan-tujuan yang satu.

Politik, dalam pandangan sejarah Islam di masa ini, lebih terpusat pada fase kedua dibandingkan dengan fase pertama. Karena saat itu masyarakat Islam sudah dapat menjalankan kedaulatannya daripada di masa Mekkah yang masih belum bebas dan sembunyi – sembunyi dalam melaksanakan semua ajaran dari Nabi Muhammad SAW dan sudah hidup dalam jaman kebebasan dan independensi. Di masa ini masyarakat Islam juga dapat melaksanakan pemerintahan sendiri karena pada masa ini Nabi Muhammad SAW sudah menjadi seorang pemimpin, baik secara agama maupun pemerintahan. Sehingga nilai – nilai Islam dapat dipraktikkan terutama dalam bahasan ini adalah secara politik. Dalam pandangan sejarah secara umum, permulaan di sini adalah sebuah fase pembentukan dan fase pembangunan.

Dalam fase ini teori politik Islam sendiri memiliki urgensi yang besar dalam menentukan arah kejadian-kejadian historis selanjutnya dan sebagai pondasi yang kemudian dipatuhi oleh generasi- generasi berikutnya sepanjang sejarah. Sedangkan apabila dilihat dari segi pemikiran teoritis, pengaruhnya terbatas pada kenyataannya yaitu sebagai jiwa atau pedoman atau rujukan untuk kemudian ditafsirkan masing – masing oleh masyarakat Islam selanjutnya. Dimana misalkan seperti bagaimana penentuan pendapat dengan melakukan musyawarah atau bagaimana pemimpin harus memiliki kejujuran dan memikirkan tentang rakyat walaupun sang pemimpin sendiri harus menderita. Sedangkan selain itu, teori politik Islam disini hampir bisa

dikatakan tidak memiliki hubungan dengan tumbuhnya pendapat-pendapat parsial yang memiliki ciri khasnya masing-masing. Di masa ini dianggap bahwa teori Islam masih secara umum dan belum tercampur oleh pengaruh-pengaruh yang didapatkan dari gabungan pemikiran lain karena dirasa masyarakatnya masih belum komplek dan Sang Pendiri tonggak masih hidup sehingga sangat jarang sekali terjadi perbedaan pendapat dan perdebatan.

Hal ini berhubungan dengan objek kajian di masa ini dianggap analisis terhadap sistem umum yang menjadi suatu platform kenegaraan umat (walaupun pada masa itu sebenarnya kondisi masyarakatnya bisa dikatakan juga sangat majemuk dengan beberapa bagian dari masyarakat Madinah pada masa itu bukanlah umat Islam), atau bisa juga tentang hubungan-hubungan yang terdapat di dalamnya seperti misalnya penyelesaian konflik antara kaum anshor dan muhajirin, atau analisis terhadap sifat-sifat kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Atau dengan kata lain, dalam menentukan apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran untuk bagian dari teori politik Islam maka harus dilakukan analisis terhadap masalah-masalah yang muncul di masa tersebut untuk kemudian dapat kita simpulkan yang dinamakan sebagai politik yang mengandung nilai - nilai ajaran Islam atau bisa dikatakan bagaimana Islam menjalankan politik di masa kenabian. Jadi untuk mengamati perkembangan teori politik Islam bukan dengan melihat bagaimana madzhab Islam yang dilaksanakan belakangan ini karena itu tetap merupakan sebuah pendapat personal dari seorang ahli politik Islam. Akan tetapi kita tidak dapat menafikan hal - hal tersebut (bagaimana sebuah madzhab memiliki pandangan politik) karena pendapat-pendapat itu tampil seiring dengan terjadinya perbedaan pendapat dari para pendahulu dan kecenderungan-kecenderungan untuk melaksanakan apa yang kemudian cendekiawan Islam pada masa dimana mulai disusun hadis-hadis.

Selanjutnya Dr. Dhiauddin Rais juga menyampaikan bahwa pendapat yang muncul (madzhab para imam) muncul juga karena didasari hidup di era yang berbeda (walaupun jaraknya belum jauh, masa hadis disusun pada tahun 3 hijriah). Sedangkan apabila teori politik dari sebuah sistem telah sempurna mencerminkan prinsip-prinsip agung yang akan diamini oleh

seluruh anggota masyarakat Islam (umat), dan terdapat kesepakatan yang terwujud di antara individu-individu, kemudian masyarakat akan lebih menyibukkan diri untuk berbicara dan berdebat tentang agenda-agenda negara yang lebih besar, maka sebenarnya pendapat individu dan teori baru tidak akan lagi dibutuhkan untuk muncul lagi seperti bagaimana nabi memimpin dan memberikan contoh bagaimana untuk berpolitik yang sesuai dengan koridor ajaran Islam.

Selanjutnya menurut Dr. Dhiauddin Rais bagaimana Rasulullah Saw mencontohkan persatuan, usaha dan pendirian sebuah masyarakat ideal yang kita pandang sebagai masyarakat yang aman dan sejahtera. Serta menggambarkan bagaimana sebuah bangunan kokoh dan kuat dalam bentuk kota madinah, dan mewujudkan replika dimana sebuah kondisi masyarakat yang ideal untuk diteladani dan dicontoh oleh umat Islam yang datang di kemudian hari di berbagai penjuru dunia.

Namun, untuk dikatakan perkembangan teori politik Islam sebagai sebuah teori pada saat itu belum dimulai, karena Rasulullah sendiri tidak pernah mengatakan bahwa ini adalah sebuah ajaran politik. Dr. Dhiauddin dalam bukunya menyatakan bahwa untuk masa ini belum ada kebutuhan terhadap hal itu (pengukuhan bahwa yang dilakukan oleh Nabi adalah sebuah subjek keilmuan politik). Akan tetapi bisa dikatakan bahwa pada masa tersebut sudah ada faktor yang kelak akan mendasari hal ini untuk terbentuk secara pemikiran dan membentuk 'teori-teori politik' secara lengkap. Di antara faktor-faktor tersebut terdapat tiga hal penting: pertama, bagaimana sifat sistem sosial yang didirikan oleh Rasulullah Saw sendiri. Kedua, konsep kebebasan berpikir untuk semua anggota masyarakat digambarkan dengan penyelesaian konflik dengan musyawarah menuju mufakat. Ketiga, dengan melakukan musyawarah Nabi tidak memaksakan pendapat walaupun ternyata masyarakat menginginkan hal yang mungkin berbeda dengan keinginan pribadi nabi yang kemudian akan dijelaskan lebih lanjut pada bab berikutnya oleh Dr. Dhiauddin Rais dalam bukunya.

Islam Dalam Politik

Dalam bab ini Dr. Dhiauddin Rais menjelaskan bahwa sistem yang dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah jika dihubungkan

dengan praktik dan variable politik di masa kini merupakan sistem politik par excellence (sebuah pujian dalam bahasa Prancis), walaupun sebenarnya di masa ini lebih ke arah sebuah sistem religius karena posisi nabi sebagai pemimpin negara sekaligus pemimpin umat akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat yang dibangun terlihat ideal apabila dipandang dari kacamata sebuah sistem politik.

Di masa ini sistemnya bisa dikatakan memiliki dua sifat yaitu religius dan juga tepat secara ilmu politik. Karena sebenarnya pemahaman hakikat ajaran Islam yang sempurna adalah juga mencakup baik urusan-urusan materi maupun rohani dan mengatur bagaimana perbuatan-perbuatan manusia terutama umat Islam sendiri (baik kehidupan individu maupun secara bermasyarakat politik) dalam kehidupannya di dunia untuk kelak di akhirat. Bahkan filsafat pemikiran secara umum ajaran Islam secara luas merangkum kedua hal itu, dan tidak membolehkan mengutamakan satu dari yang lain, kecuali jika dilihat dari segi perbedaan pandangan. Sedangkan menurut Dr. Dhiauddin sendiri keduanya menyatu dalam sebuah kesatuan secara solid, saling beriringan dan tidak mungkin terpisah satu sama lain karena satu sama lain berkaitan dan saling mendukung. Fakta tentang sifat Islam yang disampaikan ini terlihat sangat jelas, sehingga tidak membutuhkan usaha keras untuk menunjukkan contohnya. Hal itu telah digambarkan dengan fakta sejarah, dan kemudian menjadi bagian dari iman bagi kaum Muslimin dalam sepanjang sejarah yang datang kemudian. Akan tetapi tetap ada sebagian umat Islam sendiri yang mengklaim diri mereka dengan sebutan 'kalangan pembaru', dengan terang-terangan mengingkari fakta ini. Di kemudian hari banyak dari nilai – nilai ini dianggap sekedar pandangan kuno dan kemudian melakukan sekulerisme dengan memisahkan politik dengan agama.

Mereka mengklaim bahwa Islam hanyalah sekedar 'dakwah agama'(3): maksud mereka adalah, Islam hanyalah sekedar keyakinan atau hubungan rohani antara individu dengan Rabb-nya. Dan dengan demikian tidak memiliki hubungan sama sekali dengan urusan-urusan yang kita namakan sebagai urusan materi dalam kehidupan dunia ini. Di antara urusan-urusan ini adalah: masalah-masalah peperangan dan harta, dan yang paling utama adalah masalah politik. Di

antara perkataan mereka adalah: "agama adalah satu hal, dan politik adalah hal lain".

Untuk membantah pendapat tersebut, Dr. Dhiauddin Rais mengungkapkan bahwa sia – sia belaka apabila beliau memaparkan pendapat-pendapat dari para ulama Islam; karena pada dasarnya nanti pun mereka tidak akan mau mendengarkannya. Bahkan lanjut beliau fakta fakta sejarah pun dinafikan oleh mereka demi agar dapat mendapatkan pandangan yang lebih liberal. Maka Dr. Dhiauddin Rais menyertakan pula pendapat para orientalis dalam bukunya, dan menyatakan bahwa para orientalis ini telah mengutarakan hal itu dengan jelas dan tegas. Dr. Dhiauddin Rais lakukan ini karena menurutnya para 'pembaru-pembaru' itu seharusnya tidak dapat membantah dengan klaim bahwa para pembaru ini lebih modern dari para orientalis yang pendapatnya dicantumkan oleh Dr. Dhiauddin Rais, dan seharusnya tidak dapat mengklaim bahwa para pembaru lebih mampu dalam menggunakan metode riset modern, dan penggunaan metode-metode ilmiah yang diakui oleh para ahli ilmu politik. Berikut pendapat para orientalis tersebut:

1. Dr. V. Fitzgerald ⁽⁴⁾ berkata: "Islam bukanlah semata agama (a religion), namun ia juga merupakan sebuah sistem politik (a political system). Meskipun pada dekade-dekade terakhir ada beberapa kalangan dari umat Islam, yang mengklaim diri mereka sebagai kalangan 'modernis', yang berusaha memisahkan kedua sisi itu, namun seluruh gugusan pemikiran Islam dibangun di atas fundamental bahwa kedua sisi itu saling bergandengan dengan selaras, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain".
2. Prof. C. A. Nallino ⁽⁵⁾ berkata: "Muhammad telah membangun dalam waktu bersamaan: agama (a religion) dan negara (a state). Dan batas-batas teritorial negara yang ia bangun itu terus terjaga sepanjang hayatnya".
3. Dr. Schacht berkata ⁽⁶⁾: " Islam lebih dari sekedar agama: ia juga mencerminkan teori-teori perundang-undangan dan politik. Dalam ungkapan yang lebih sederhana, ia merupakan sistem peradaban yang lengkap, yang mencakup agama dan negara secara bersamaan".

4. Prof. R. Strothmann berkata ⁽⁷⁾: "Islam adalah suatu fenomena agama dan politik. Karena pembangunnya adalah seorang Nabi, yang juga seorang politikus yang bijaksana, atau "negarawan".
5. Prof D.B. Macdonald berkata ⁽⁸⁾: "Di sini (di Madinah) dibangun negara Islam yang pertama, dan diletakkan prinsip-prinsip utama undang-undang Islam".
6. Sir. T. Arnold berkata ⁽⁹⁾: " Adalah Nabi, pada waktu yang sama, seorang kepala agama dan kepala negara".
7. Prof. Gibb berkata ⁽¹⁰⁾: "Dengan demikian, jelaslah bahwa Islam bukanlah sekadar kepercayaan agama individual, namun ia meniscayakan berdirinya suatu bangun masyarakat yang independen. Ia mempunyai metode tersendiri dalam sistem pemerintahan, perundang-undangan dan institusi".

Bukti Sejarah

Seluruh pendapat-pendapat tadi diperkuat oleh fakta-fakta sejarah. Di antara fakta sejarah yang tidak dapat diingkari oleh siapapun adalah setelah timbulnya dakwah Islam kemudian terbentuk bangunan masyarakat baru yang mempunyai identitas independen yang membedakannya dari masyarakat lain. Mengakui satu undang- undang, menjalankan kehidupannya sesuai dengan sistem yang satu, menuju kepada tujuan-tujuan yang sama, dan di antara individu-individu masyarakat yang baru itu terdapat ikatan ras, bahasa, dan agama yang kuat, serta adanya perasaan solidaritas secara umum. Bangunan masyarakat yang memiliki semua unsur-unsur tadi itulah yang dinamakan sebagai bangunan masyarakat 'politik'. Atau yang dinamakan sebagai 'negara'. Tentang negara, tidak ada suatu definisi tertentu, selain adanya fakta terkumpulnya karakteristik-karakteristik seperti yang telah disebutkan tadi dalam suatu bangunan masyarakat.

Di antara fakta-fakta sejarah yang tidak diperselisihkan juga adalah, bangunan masyarakat politik ini atau 'negara', telah memulai kehidupan aktifnya dan mulai menjalankan tugas-tugasnya serta merubah prinsip-prinsip teoritis menuju dunia praktis. Hal ini terjadi setelah tersempurnakan kebebasan dan kedaulatannya dan kepadanya dimasukkan unsur-unsur baru dan adanya penduduk yang ditandai dengan

pembacaan bai'at Aqabah satu dan dua, yang dilakukan antara Rasulullah Saw dengan utusan dari Madinah, yang dilanjutkan kita kenal dengan peristiwa hijrah.

Pada faktanya, kedua bai'at ini -- yang tidak diragukan oleh seorangpun tentang berlangsungnya kedua bai'at ini-- merupakan suatu titik transformasi dalam Islam (11). Dan peristiwa hijrah hanyalah salah satu hasil yang ditelurkan oleh kedua peristiwa bai'at itu. Pandangan yang tepat terhadap kedua bai'at tadi adalah dengan melihatnya sebagai batu pertama dalam bangunan 'negara Islam'. Dari situ akan tampak urgensitas kedua hal itu. Alangkah miripnya kedua peristiwa bai'at itu dengan kontrak-kontrak sosial yang di deskripsikan secara teoritis oleh sebagian filosof politik pada era-era modern dan menganggapnya sebagai fondasi bagi berdirinya negara- negara dan pemerintahan. Namun bedanya, 'kontrak sosial' yang dibicarakan Roussou dan sejenisnya hanyalah semata ilusi dan imajinasi, sementara kontrak sosial yang terjadi dalam sejarah Islam ini berlangsung dua kali secara realistis di Aqabah. Dan di atas kontrak sosial itu negara Islam berdiri. Ia merupakan sebuah kontrak historis. Ini merupakan suatu fakta yang diketahui oleh semua orang. Padanya bertemu antara keinginan-keinginan manusiawi yang merdeka dengan pemikiran-pemikiran yang matang, dengan tujuan untuk mewujudkan risalah yang mulia.

Dengan demikian, negara Islam terlahirkan dalam keadaan yang amat jelas. Dan pembentukannya terjadi dalam tatapan sejarah yang jernih. Tidak ada satu tindakan yang dikatakan sebagai tindakan politik atau kenegaraan, kecuali dilakukan oleh negara Islam yang baru tumbuh ini. Selanjutnya diikuti dengan penyiapan perangkat untuk mewujudkan keadilan, menyusun kekuatan pertahanan, mengadakan pendidikan, menarik pungutan harta, mengikat perjanjian atau mengirim utusan-utusan ke luar negeri. Ini merupakan fakta sejarah yang ketiga. Adalah mustahil seseorang mengingkarinya. Kecuali jika kepadanya dibolehkan untuk mengingkari suatu fakta sejarah yang terjadi di masa lalu, dan yang telah diterima kebenarannya oleh seluruh manusia. Dari fakta-fakta yang tiga ini --yang telah kami sebutkan-- terbentuk bukti sejarah yang menurut kami dapat kami gunakan sebagai bukti --di samping pendapat kalangan orientalis yang telah disitir sebelumnya-- atas sifat

politik sistem Islam. Jika telah dibuktikan, dengan cara- cara yang telah kami gunakan tadi, bahwa sistem Islam adalah sistem politik, dengan demikian maka terwujudlah syarat pertama yang mutlak diperlukan bagi keberadaan pemikiran politik. Karena semua pemikiran tentang hal ini, baik tentang pertumbuhannya, hakikatnya, sifat-sifatnya atau tujuan-tujuannya, niscaya ia menyanggah sifat ini, yaitu sifatnya sebagai suatu pemikiran politik. Syarat ini merupakan faktor yang terpenting dalam pertumbuhan pemikiran ini. Bahkan ia merupakan landasan berpijak bagi kerangka-kerangka teoritis dan aliran-aliran pemikiran yang beragam. Oleh karena itu, amatlah logis jika kami curahkan seluruh perhatian ini untuk meneliti dan menjelaskannya.

Dasar Filosofis Negara Islam

Dr. Dhiauddin menjelaskan landasan filosofis dan teologis dari konsep negara dalam Islam, termasuk pengertian tentang keadilan, kedaulatan, dan tanggung jawab pemimpin, terutama sifat-sifat politik yang muncul dan dicontohkan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW pada masa kepemimpinan di fase Madinah. Bagaimana penyelesaian konflik pengambilan keputusan yang walaupun saat itu pemikiran politik belum menjadi sebuah keilmuan namun dapat dipraktikkan dan terjadi dalam sejarah kepemimpinan nabi yang tidak dapat dibantah bahwa hal – hal ini kemudian juga menjadi sebuah ruh dari teori politik yang bisa dikatakan sesuai dengan pendapat ahli politik di kemudian hari.

Pada dasarnya ajaran Islam bukan hanya bagaimana tentang sebuah agama namun juga mencakup bagaimana seorang individu menjalankan kehidupannya yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi bagaimana sebuah masyarakat yang terbentuk dari individu – individu dengan pemikiran yang sama. Sehingga dapat terwujud sebuah masyarakat ideal dengan bentuk paling tidak mendekati dengan apa yang sudah Rasulullah SAW bangun di masa awal perkembangan Islam.

Sejarah Pemikiran Negara Islam

Dalam pandangannya Dr. Dhiauddin Rais ini seringkali merujuk pada sejarah pemikiran Islam, menggali bagaimana berbagai pemikir Muslim dari masa lalu mendefinisikan dan membangun konsep negara. Untuk kemudian perlu

dilakukan sebuah proses membukukan sebuah teori politik yang kemudian bisa menjadi sebuah dasar riset ke depan. Terlepas dengan begitu banyaknya perbedaan pendapat yang terjadi di antara para cendekiawan muslim dari masa ke masa, namun pendapat pendapat ini banyak dibangun dari sebuah sumber yang sama. Jadi Dr. Dhiauddin Rais memberikan paparan pada hubungan dari pendapat satu dengan pendapat yang lain dibarengi dengan mengisahkan kejadian yang mendasari kemudian untuk kemudian dapat mengambil kesimpulan bagaimana sebenarnya walaupun berbeda perbedaan pendapat ini hanya berdasarkan dari perbedaan pendapat dan kondisi politik yang melatarbelakangi munculnya pendapat ini. Seperti ketika Dr. Dhiauddin Rais memberikan gambaran dan kesalahpahaman bagaimana sebuah kelompok yang menamai diri sebagai kelompok pembaharu memberikan sebuah pandangan dimana Islam seharusnya dianggap sebagai sebuah dakwah agama bukan urusan politik yang notabene adalah urusan dunia.

Perbandingan Dengan Sistem Politik Lain

Dr. Dhiauddin Rais juga membandingkan sistem pemerintahan Islam dengan sistem politik lain serta menjelaskan keunikan dan kelebihan sistem Islam dalam konteks moral dan etika.

Praktik Kenegaraan Dalam Sejarah Islam

Penulis memberikan contoh-contoh praktik pemerintahan dalam sejarah Islam, seperti khilafah dan pemerintahan di era modern, untuk menunjukkan bagaimana teori ini diterapkan.

Tantangan dan Kontroversi

Buku ini juga meng-address berbagai tantangan yang dihadapi oleh negara-negara Islam saat ini, serta perdebatan mengenai penerapan prinsip- prinsip Islam dalam konteks global yang berubah.

Buku "Teori Negara Islam" yang ditulis oleh Dr. Dhiauddin Rais adalah sebuah karya yang mengkaji konsep dan prinsip dasar negara dalam perspektif Islam. Dalam buku ini, Dr. Dhiauddin Rais membahas berbagai aspek penting mengenai bagaimana negara seharusnya dibangun dan diatur berdasarkan ajaran Islam.

KESIMPULAN

Artikel oleh Dr. Dhiauddin Rais memberikan pemahaman yang berharga tentang teori politik Islam seharusnya dapat menjadi sebuah dasar pemikiran untuk masyarakat global dan Indonesia terutama untuk memiliki sebuah nilai yang bisa menjadi salah satu referensi dan pengejawantahan dari ideologi yang kita miliki yaitu Pancasila. Meskipun ada beberapa keterbatasan, penelitian ini merupakan langkah awal yang penting untuk dapat merobohkan tembok perbedaan pendapat antara pemikir Islam konservatif dan kontemporer untuk dapat menyatukan pandangan tentang teori politik Islam sehingga dapat menjadi sebuah pola pemikiran yang kelak dapat membuktikan bahwa agama bukan sebuah batu sandungan untuk sebuah pemikiran politik dan bahkan bisa menjadi sebuah nilai yang bisa diakui sebagai praktik dari ideologi Pancasila yang bangsa ini anut dan pahami.

Melalui analisis pustaka yang komprehensif, Dr. Dhiauddin Rais berusaha untuk menawarkan pandangan yang mendalam tentang bagaimana negara seharusnya berfungsi dan memiliki cita-cita dalam kerangka nilai-nilai Islam, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat modern yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan. Buku ini menjadi referensi penting bagi mereka yang tertarik dalam studi politik Islam dan teori kenegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik (1987). Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia. Jakarta: LP3ES.
- Almand, Gabril A., R. Scott Appleby, dan Emmanul Sivan.(2003). Strong Religion, The Rise of Fundamentalism Around the World. Chicago and London: Th3 University Chicago Press
- Anwar Sanusi, AS.(2011).Pemikiran Politik Abul A'la al Maududi. Inspirasi : Jurnal Fakultas Adab Dakwah Ushuliddin.
- Furkon,Aay Muhammad(2004).Partai Keadilan Sejahtera:Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer.Bandung:Teraju.

- Hugh.Kennedi.(1924).The Caliphate. London: Oxford
- Ibnu.Hisyam. (1864). Sirah Nabawiyah. Al Maktabah at Tijariah al Kubra.Gottingen:Stuttgard.
- J. Matters.(1932) .Concepts of State, Sovereignty and International Law.Kiel:Willey
- J.N. Figgis.(1698).The Divine Right of Kings. Florence: Uffizi
- John.Benson. (1903). Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory. New York.
- Madjid, Nurcholish (1999). Cita-cita Politik Islam Era Reformasi.Jakarta:Paramadina.
- Muhammad.Khudhari.Muhadharat fi Tarikh al Umam al Islamiah.
- Prof. H.A.R. Gibb. (1949). "Muhammedanism", USA:OUAP.
- Rais, Dhiauddin.(1960). Teori Politik Islam. Jakarta:Gema Insani Press.
- Solikhhan, Umar. (2013). Pemikiran Politik Abul A'la al Maududi. Pangkalpinang: Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ratno.Lukito.(2009).Ilusi Negara Islam.Jakarta:The Wahid Institute.
- Roy,Oliver (1996).The Failure of political Islam.Harvard:Harvard University Press.
- Soltau, Roger H. (1952). Introduction of politics .London: Longman.
- Wahid,K.H.Abdurrahman(1999).Islam,Negara, dan Demokrasi.Jakarta:Erlangga.